



News Title : Cegah Potensi Kerugian Masyarakat, Bappebtu Blokir 1.327 Domain Situs Web Entitas Ilegal

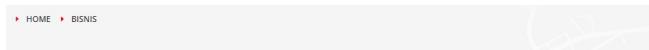
Media Name : Mediaasuransinews.co.id **Journalist :** Benyamin D Hana

Publish Date : 22 August 2023 **Tonality :** Positive

News Page : [News Value : 0](#)

Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebtu), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan) **Ads Value : 0**

Section/Rubrication : Bisnis **Topic :** Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal



Cegah Potensi Kerugian Masyarakat, Bappebtu Blokir 1.327 Domain Situs Web Entitas Ilegal

BY BENYAMIN D HANA | SELASA, 22 AGUSTUS 2023 | 09:42 WIB



Kantor pusat Kementerian Perdagangan. | Foto: ist

Share This Article:



Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebtu) memblokir 1.327 domain situs web entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) pada Januari–Agustus 2023.

Pemblokiran dilakukan Bappebtu dengan mengandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah tersebut merupakan upaya strategis Bappebtu dalam mencegah potensi kerugian masyarakat akibat kegiatan ilegal bidang PBK.

"Bappebtu terus melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin dan berkelanjutan terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal. Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," kata Kepala Bappebtu, Didid Noordiatmoko, dalam keterangan resminya, Selasa, 22 Agustus 2023.

|Baca juga:

Meskipun Bappebtu telah memblokir domain situs web entitas ilegal, masih banyak ditemukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang PBK ilegal di tengah masyarakat. Dikit minta entitas ilegal yang telah diblokir agar mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebtu dan menurunkan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Setelahnya, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan normalisasi dan pencabutan blokir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison, mengingatkan setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebtu. Berikutnya, tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Risiko menanti masyarakat yang bergabung atau bertransaksi di entitas ilegal. Apabila terjadi perselisihan, Bappebtu selaku regulator tidak dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Demikian sebaliknya. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pelaku usaha yang telah memiliki izin dari Bappebtu, Bappebtu dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah Aldison.

Dia juga mengimbau kepada entitas ilegal di bidang PBK untuk mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebtu serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kepada masyarakat, Bappebtu mengimbau agar lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK.